

**DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI
INDONESIA-FILIPINA MENGHADAPI TERORISME DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-FILIPINA**

**DEFENSE DIPLOMACY ON THE INDONESIA-PHILIPINES INFORMATION
EXCHANGE COOPERATION COMBATTING TERRORISM IN THE INDONESIA-
PHILIPINES BORDER TERRITORY**

Sutrimo¹, Harangan Sitorus², Muhammad Wirayudha Ramadhan³

Prodi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(muhammad.ramadhan@idu.ac.id)

Abstrak – Jurnal ini membahas tentang kerja sama pertukaran informasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina, dalam menghadapi ancaman terorisme yang menjadi ancaman bagi kedua negara. Ancaman terorisme terjadi di wilayah kedua negara, sering terjadinya aksi terorisme di perairan Sulu, kekhawatiran dengan *returning fighters* yang kembali dari Syria, dan terjadinya krisis Marawi. Dalam menyelesaikan masalah ancaman ini dibutuhkan kerja sama kedua negara. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah kerja sama pertukaran informasi. Informasi adalah unsur yang sangat penting dalam keamanan nasional, bersama dengan diplomasi, militer, dan ekonomi (DIME). Jurnal ini mengkaji tentang dua pertanyaan besar yang berkaitan dengan implementasi kerja sama pertukaran informasi, dan mengapa terorisme Filipina Selatan menjadi ancaman bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Didukung oleh data-data primer dan sekunder, melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam kerja sama ini. Lebih lanjut implementasi kerja sama ini masih memiliki kendala dalam bidang komunikasi dan teknologi.

Kata Kunci : Pertahanan, Keamanan Nasional, Pertukaran Informasi, Diplomasi Pertahanan

Abstract –This journal discusses about the information exchange cooperation between Indonesia and The Philipines, two countries confronted by the threats of terrorism . The terrorists act happens in both countries, particulary the terrorist act in Sulu, the threats of returning fighters from Syria, and Marawi Crisis. Combatting the terrorism Indonesia conduct defense cooperations with The Philipines. One of the defense cooperation is the information exchange cooperation. Information is an important elements to the national security, along with diplomacy, military, and economy (DIME). The research will be researching about two grand questions concerning the implementations of the information exchange cooperation, and the reasons of Southern Philipines Terrorism becomes a threat to Indonesia. The research will be conducted utilizing qualitative approach. Primary and secondary

¹ Dr. Drs. Sutrimo, M.M., M.Si, Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan.

² Brigjen TNI Dr. Harangan Sitorus, S.I.P., M.Sc.,M.Si (Han), Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan.

³ Muhammad Wirayudha Ramadhan, S.IP, M.Han. Iuluan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada Prodi Diplomasi Pertahanan.

datas from interview and literature study, will support the research. The research revealed that defense diplomacy has an important role in this kind of cooperation. Furthermore the implementation of this cooperation is having some problems such as in communication aspect and the aspect of technology.

Keyword : Defense, National Security, Information Exchange, Defense Diplomacy

Pendahuluan

Dalam lingkungan strategis Indonesia saat ini, masalah yang menjadi perhatian bagi keamanan negara saat ini adalah masalah ancaman terorisme yang terjadi di Filipina Selatan. Masalah yang dihadapi seperti pembajakan kapal yang sering terjadi di perairan Sulu, dan juga masalah penyelundupan senjata api ke Indonesia.

Masalah terbaru terjadi saat daerah Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao, mengalami krisis keamanan. Krisis ini disebabkan adanya penyerangan terhadap kota tersebut oleh kelompok gabungan Maute-Abu Sayyaf yang terafiliasi dengan kelompok *Islamic State* (IS), pada 23 Mei lalu. Tercatat sudah 300 korban tewas dari peristiwa ini, terdiri dari 225 gerilyawan, 59 tentara dan 26 warga sipil.⁴

Pemerintah Filipina telah menerapkan status darurat militer untuk menghadapi masalah ini. Pengamat menyebutkan, Abu Sayyaf, Maute, dan kelompok garis keras lainnya mengklaim bahwa mereka ingin membuat sebuah kekhalifahan Islam di selatan untuk ISIS⁵. ISIS sendiri adalah kelompok teroris yang terbesar saat ini, selain bertindak langsung melakukan teror, kelompok teroris yang dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi menjadi inspirasi pelaku teror di sejumlah negara. Sekurangnya ada 228 serangan teror di 33 negara, di luar Irak dan Suriah, dengan korban jiwa mencapai 2.773 orang. Dari jumlah itu 46 serangan di antaranya dilakukan karena terinspirasi dari berbagai teror yang dilakukan ISIS⁶.

Kedua hal tersebut menjadi perhatian bagi lingkungan strategis Indonesia. Apabila tidak dicegah ancaman

⁴ Muhaimin, "Korban Tewas di Marawi Tembus 300 Jiwa, Duterte: Operasi akan Berakhir", diakses pada 27 Agustus 2017, dari <https://international.sindonews.com/read/1214581/40/korban-tewas-di-marawi-tembus-300-jiwa-duterte-operasi-akan-berakhir-1497745014>.

⁵ Glori K. Wadrianto, "Apa yang Terjadi di Marawi, dan Siapa Isnilon Hapilon? ", diakses pada 27 Agustus 2017, dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/05/24/13041501/apa.yang.terjadi.di.marawi.dan.siapa.isnilon.hapilon>.

⁶ Nathacia Suhendra, "Teror ISIS di Dunia", diakses pada 27 Agustus 2017, dari <https://katadata.co.id/infografik/2017/06/02/teror-isis-di-dunia>.

ISIS yang terjadi di Marawi, bisa masuk ke Indonesia, dengan pertimbangan kedekatan geografis kedua negara.

Sebelum adanya masalah Marawi, Indonesia sendiri telah menghadapi masalah dengan kelompok militan Abu Sayyaf. Kelompok ini seringkali melakukan penculikan dan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia yang melewati perairan Sulu. Pada awal tahun, tujuh orang warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan oleh kelompok tersebut. Sepanjang tahun 2016 terdapat tujuh peristiwa penculikan Warga Negara Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf.⁷

Mempertimbangkan hal tersebut maka Indonesia menginisiasi sebuah kerja sama dengan melibatkan negara tetangga, yaitu Filipina dan Malaysia. Dalam bentuk kerja sama trilateral yang diberi nama Indomalphi. Kerja sama ini juga melibatkan Singapura dan Brunei Darussalam sebagai *observer*. Kerja sama trilateral ini berupa *coordinated patrol* di perairan Sulu. Hal tersebut diharapkan dapat mengamankan Perairan Sulu, dari ancaman kejahatan transnasional, seperti perompakan serta yang paling utama

adalah mencegah penyebaran ISIS di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Inisiatif dalam menjalin kerja sama dengan Filipina dalam menjaga pertahanan negara dari ancaman terorisme telah dilakukan. Namun bentuk kerja sama patroli bersama kurang tepat dilaksanakan. Mengingat Indonesia dan Filipina telah memiliki suatu bentuk kerja sama *coordinated patrol* sendiri, dengan nama *Coordinated Patrol Philippines Indonesia* (CORPAT Philindo). CORPAT Philindo adalah implementasi dari upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam saling percaya dan *Capacity Building* kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina, tidak hanya pada aspek militer tapi juga aspek ekonomi dan sosial budaya termasuk juga Kejahatan Transnational. Kegiatan latihan bersama yang dilaksanakan, merupakan program latihan rutin yang dilaksanakan antara pihak TNI AL dengan Republic of Philippines Navy antara lain, melaksanakan tugas pokok Operasi Patroli terkoordinasi dalam waktu yang telah ditentukan yang meliputi pencegahan atau penangkalan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran wilayah dan tindak kejahatan di wilayah Perairan Laut Sulawesi

⁷ Lutfy Mairizal Putra, "Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun Ini", diakses pada 28 Agustus 2017, dari

<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanjangan.tahun.ini>

Perbatasan wilayah laut Indonesia – Filipina. Selain itu patroli ini sekaligus sebagai bentuk pengamanan pulau-pulau terluar NKRI yang berdekatan dengan Philipina⁸. Bentuk kerja sama ini berbentuk latihan bersama yang rutin diadakan setiap tahunnya, namun dengan durasi yang sangat sedikit. Terakhir pada CORPAT Philindo 2017, hanya diadakan selama enam hari, dari tanggal 6 Juli sampai dengan 12 Juli 2017. Hal ini menimbulkan keraguan akan banyaknya manfaat yang didapat mengingat waktu yang sangat singkat.

Adanya kesamaan antara bentuk kerja sama CORPAT Philindo dan Indomalphi menimbulkan beberapa pertanyaan. Seperti efektifitas kerja sama tersebut, perbedaan dari kerja sama tersebut, dan alasan menambah Malaysia kedalam kerja sama tersebut. Bertambahnya jumlah negara yang terlibat dalam suatu kerja sama dapat berakibat pada meningkatnya tingkat kesulitan dalam berkordinasi. Hal ini berbeda dengan kerjasama bilateral yang hanya perlu berkordinasi dengan satu negara saja. Selain itu secara historis

Malaysia dan Filipina memiliki sengketa terkait Sabah. Selain itu kedua negara juga memiliki klaim yang bersinggungan satu sama lainnya, terkait masalah sengketa di Laut China Selatan. Sehingga menimbulkan keraguan dalam perkembangan kerja sama pertahanan ini kedepannya.

Selain itu kerja sama patroli bersama belumlah cukup dalam mengatasi masalah terorisme. Kerja sama ini mungkin dapat membatasi perpindahan terorisme dari Filipina atau militan asal Indonesia yang ikut membantu kelompok Maute di Marawi. Namun hal tersebut belumlah cukup. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Indonesia harus mampu mengeliminasi akar permasalahan tersebut. Dasar dari permasalahan tersebut adalah kelompok-kelompok militan yang ada di Filipina Selatan. Untuk itu perlu adanya usaha dalam memberantas kelompok tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari hal tersebut. Indonesia menawarkan diri untuk mengirimkan pasukan bersenjata dalam membantu krisis menghentikan di Marawi⁹.

⁸ Dispenarmatim, "PANGARMATIM BUKA CORPAT PHILINDO XXX-16", diakses pada 28 Agustus 2017, dari <http://www.tnial.mil.id/News/OperasiLatihan/tabid/80/articleType/ArticleView/articleId/29361/PA>

NGARMATIM-BUKA-CORPAT-PHILINDO-XXX16.aspx.

⁹ Ahmad Romadoni, "Wiranto: Indonesia Rancang Operasi Berantas ISIS di Marawi", diakses pada 28 Agustus 2017, dari

Namun, pengiriman pasukan ini dapat saja tidak terealisasi. Alasannya adalah adanya prinsip *non-interference* antara negara ASEAN. Juga adanya *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Suatu perjanjian yang mengatur kerja sama antara negara-negara ASEAN, salah satunya tentang prinsip *non-interference* tersebut¹⁰. Sehingga tanpa adanya persetujuan dari negara yang bersangkutan suatu negara tidak dapat mengirim pasukannya ke negara lainnya, dan terlibat dalam masalah internal negara tersebut, walaupun dampak dari masalah tersebut juga mempengaruhi negaranya.

Selain dari hal tersebut kerja sama lain juga harusnya dilaksanakan. Kerja sama seperti pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Kerja sama ini telah rutin dijalankan setiap tahunnya¹¹. Ada beberapa perjanjian yang dibuat oleh kedua negara yang memuat tentang kerja sama ini. Contohnya adalah *Joint Statement of Special ASEAN Defence Ministers' Meeting on Countering Violent Extremism (CVE), Radicalization and Terrorism*. Pada pertemuan ADMM di

Manila, Filipina 23 Oktober. Pada poin ke dua pernyataan bersama tersebut, berbunyi: "*Encourage stronger and cooperative intelligence sharing platform to facilitate the flow of information, in particular on terrorists and terrorist organisations, their movement and funding, and any other information needed to protect lives, property and the security of all modes of travel*". Dapat diartikan bahwa kerja sama pertukaran informasi yang lebih baik perlu dijalankan dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kerja sama ini tidak hanya menyangkut pada pertukaran informasi intelijen saja, tetapi juga menyangkut pembagian pengetahuan dan pengalaman. Indonesia adalah negara yang memiliki pengalaman dalam menghadapi terorisme. Selain Indonesia juga memiliki pengalaman dalam menghadapi masalah insurgensi dan juga strategi gerilya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan dalam menghadapi kelompok Santoso melakukan taktik gerilya di hutan Sulawesi. Kedua strategi ini sering kali digunakan oleh kelompok

<https://www.liputan6.com/news/read/3009710/wiranto-indonesia-rancang-operasi-berantas-isis-di-marawi>.

¹⁰ ASEAN, "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976", diakses pada 28 Agustus 2017, dari

<http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>.

¹¹ KBRI Manila, *Renstra KBRI Manila 2015-2019*, (Manila : Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2014) hlm. 1.

teroris akibat adanya perbedaan kekuatan dengan militer dari Filipina. Indonesia juga memiliki pengalaman dalam menangani masalah terorisme yang berlatar belakang pemahaman radikal, seperti yang disampaikan oleh Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.¹²

Bentuk kerja sama dalam hal ini dapat berupa pemberian ilmu tentang menghadapi strategi tersebut. Mekanismenya dapat berupa pengiriman perwira TNI ke Filipina untuk memberikan pembekalan ilmu. Atau sebaliknya perwakilan tentara Filipina yang datang ke Indonesia untuk belajar. Nantinya diharapkan tentara Filipina dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menghadapi ancaman terorisme di Filipina Selatan. Kerja sama ini tentu lebih mudah dan juga lebih murah dibandingkan mengirimkan bantuan lain seperti persenjataan. Selain itu Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam menghadapi beberapa kelompok milisi di Filipina. Kaitannya dalam kapasitas Indonesia sebagai ketua *Organisation of Islamic Cooperation-Peace Committee on Southern Philippines* (OIC-PCSP) sebelum digantikan

oleh Mesir pada 2013-2014. Fungsi dari organisasi ini adalah untuk mempercepat proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok *Moro National Liberation Front* (MNLF). Indonesia juga masih aktif dalam mengirimkan tim pengamat dalam *International Monitoring Team* (IMT) di Mindanao. Dalam kerangka perdamaian antara Filipina dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF).¹³

Kerja sama pertukaran informasi sering dimasukkan kedalam poin perjanjian pertahanan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Baik dalam perjanjian bilateral, trilateral, maupun multilateral. Sering kali dalam membuat perjanjian yang baru kerja sama ini kembali dijadikan salah satu kerja sama, antara lain dalam Perjanjian Angkatan Laut Indonesia dan Filipina tahun 1961, Perjanjian Indonesia dan Filipina dalam Bidang Pertahan tahun 1997, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Indonesia dan Filipina dalam Kerja Sama Pencegahan dan Memerangi Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kapasitas tahun 2017, ditambah dengan adanya forum seperti ARF, ADMM, dan ADMM Plus, dan terakhir adalah kerja sama Trilateral Indomalphi. Sehingga menimbulkan pertanyaan

¹² Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI*, (Jakarta: CMB Press, 2013) hlm. 156

¹³ KBRI Manila, *loc. cit.*

bagaimana implementasi dari kerja sama yang telah dibuat sebelumnya.

Kerja sama ini juga dimaksudkan sebagai sarana dalam membangun *confidence building measure* (CBM). Yang dapat membukakan jalan bagi Indonesia dan Filipina dalam menjalin kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif lagi kedepannya. Mengingat kedua negara menghadapi ancaman yang sama, yaitu ancaman terorisme. Ancaman ini tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja, dibutuhkan sinergi antara kedua negara dalam menghadapinya.

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber primer dan sekunder yang akan diperoleh berbentuk data narasi, deskripsi dan bukan angka. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil interview dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kedutaan Besar, dan juga atase pertahanan. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari sumbernya dimana hal ini diambil dari arsip yang dapat memberikan data

tambahan yang dapat membantu peneliti seperti buku, artikel pada majalah ataupun surat kabar, dan situs internet. Data-data tersebut adalah data yang berkaitan dengan kerja sama pertukaran informasi antara Indonesia dan Filipina dalam menghadapi masalah terorisme di perbatasan Indonesia dan Filipina.

Setelah data didapatkan ada beberapa tahapan yang harus dijalankan oleh peneliti. Tahapan tersebut antara lain adalah pengambilan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹⁴. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan dari data-data yang didapat pada proses pengumpulan data. Kondensasi data tidak dapat terpisah dari proses analisis. Dalam hal ini kondensasi data yang dilakukan, terkait analisa kerja sama pertahanan Indonesia dalam pertukaran informasi dengan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme. Setelah dilakukan reduksi data dan penganalisaan maka selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat yang memetakan hubungan antara kategori, variabel atau objek dengan subjek penelitian, dalam hal ini terkait penelitian analisa diplomasi pertahanan

¹⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded*

Sourcebook (London: Sage Publications Inc, 1994) hlm. 31-33.

Indonesia dalam pertukaran informasi dengan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme. Dari data yang sudah didapatkan dari penelitian akan disajikan dengan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, terkait dengan masalah diplomasi pertahanan Indonesia dalam pertukaran informasi dengan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme.

Potensi Ancaman Terorisme Filipina Selatan Terhadap Indonesia

Kurang lebih ada enam belas bentuk teror yang dilakukan oleh teroris.¹⁵ Beberapa aksi teror tersebut sering dilakukan oleh kelompok terorisme Filipina Selatan. Seperti aksi teror menggunakan bom, yang terakhir terjadi di Davao City pada tahun, 2016. Selanjutnya adalah kegiatan pembajakan, pembunuhan, perampokan, penyanderaan dan penculikan. Kegiatan-kegiatan ini adalah aksi teror yang sering kali dijalankan oleh kelompok terorisme Filipina Selatan. Aksi ini seringkali terjadi di perairan Sulu yang menjadi perbatasan Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Terorisme Filipina Selatan menjadi potensi ancaman didalam sistem internasional yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Seperti dibahas dalam pembahasan hasil penelitian, terorisme Filipina Selatan memberikan banyak dampak bagi Indonesia, yang mengancam keselamatan Warga Negara Indonesia ataupun kegiatan ekonomi internasional dari Indonesia, sehingga masalah ini mempengaruhi kepentingan nasional dari Indonesia.

Keuntungan nasional menurut Donald E. Nuechterlin, terbagi kedalam empat jenis¹⁶. Keuntungan pertahanan yang menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman. Kedua adalah kepentingan ekonomi, kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. Selanjutnya kepentingan tata internasional, kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya. Terakhir adalah kepentingan ideologi,

¹⁵ Marthen Luther Djari, op.cit, hlm.20-28 .

¹⁶ Donald E. Nuechterlein, *National Interests and Presidential Leadership : The Setting of Priorities* (Boulder, CO: Westview Press, 1978), hal 54-56.

kepentingan yang berkaitan dengan ideologi atau pandangan hidup.

Hal ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai kepentingan pertahanan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai kepentingan ekonomi Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kepentingan tata internasional dan Ideologi Indonesia.

Indonesia memiliki kepentingan dalam mengatasi Terorisme Filipina Selatan, ancaman terorisme tersebut mengganggu kepentingan Indonesia dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Terorisme Filipina Selatan dapat mengancam Warga Negara Indonesia, apabila kelompok terorisme tersebut berpindah dan melakukan aksi terorisme di Indonesia, juga mengancam WNI yang berada di Filipina.

Indonesia harus dapat hadir dalam melindungi warga negaranya dan

menghentikan ancaman yang berasal dari Filipina Selatan ini, sesuai dengan tujuan dari Indonesia. Hal ini juga termasuk dalam kepentingan pertahanan Indonesia. Dalam mewujudkan kepentingan pertahanan dalam masalah ini, Indonesia memerlukan kerja sama dari Filipina. Ancaman tersebut berasal dari Filipina tanpa adanya kerja sama dari Filipina, Indonesia tidak dapat menghentikan ancaman tersebut.

Berkaitan dengan kepentingan ekonomi Indonesia, Filipina adalah salah satu mitra dagang penting yang dimiliki Indonesia, Filipina memberikan surplus sebesar 2,97 Dollar AS.¹⁷ Gangguan keamanan di Filipina dapat mengganggu perdagangannya dengan Indonesia, sehingga dapat berakibat pada turunnya surplus pada neraca perdagangan Indonesia dan Filipina, akibatnya penurunan dalam pemasukan negara sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada perekonomian Indonesia.

Mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan dari terorisme Filipina Selatan terhadap kepentingan nasional Indonesia, maka pemerintah Indonesia perlu mengambil kebijakan dalam bekerja sama dengan pemerintah Filipina dengan tujuan

¹⁷ Kementerian Perdagangan Indonesia, *Laporan Atase Dagang Filipina Januari 2017* (Jakarta: Kemendag, 2017) hlm. 1-2.

mengeliminasi ancaman tersebut bagi kepentingan Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Terorisme Filipina Selatan

Dalam mengamankan kepentingan nasionalnya pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga yang terkait, perlu membuat kebijakan yang dapat mengatasi ancaman terorisme Filipina Selatan. Kebijakan yang dapat dijadikan pedoman atau landasan dalam bertindak bagi lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dari masalah, yaitu ancaman terorisme Filipina Selatan.

Kebijakan yang dimaksud dalam masalah ini adalah kebijakan internasional. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan kegiatannya dalam mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.¹⁸ Ancaman terorisme Filipina Selatan berasal dari lingkungan eksternal Indonesia, maka dibutuhkan suatu kebijakan internasional untuk mengatasi masalah ancaman Terorisme ini.

Terorisme Filipina Selatan termasuk kedalam terorisme internasional. Kegiatan terorisme menjadi kegiatan terorisme internasional apabila, diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri. Kedua dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau fraksi lebih dari satu negara. Terakhir adalah diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing¹⁹. Pada masalah terorisme Filipina Selatan, warga asing juga menjadi target, dengan terjadinya penculikan dan penyanderaan warga asing. Kedua, terorisme Filipina selatan juga dilakukan bersama-sama oleh fraksi lebih dari satu negara, dengan adanya keterlibatan dari IS dan FTF dari luar Filipina.

Dalam mengatasi masalah ini dibutuhkan kerja sama dari kedua negara. Menurut Gibson, ada dua faktor yang menjadi alasan bagi kelompok kerja sama untuk bekerja sama.

Pertama adalah faktor kebutuhan, dalam kerja sama Indonesia dan Filipina alasan pertama adalah adanya kebutuhan. Kedua negara memiliki kebutuhan yang sama sehingga memutuskan untuk menjalin kerja sama. Dalam masalah kerja

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pegantar Ilmu Hubungan*

Internasional (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm.49.

¹⁹ *Loc. cit*, hlm.140-141.

sama pertahanan, yang menjadi kebutuhan utama adalah mengamankan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan warga negaranya.

Kedua adalah karena adanya kedekatan dan daya tarik. Indonesia dan Filipina memiliki kedekatan geografi dan memiliki beberapa wilayah yang berbatasan secara langsung. Kedekatan geografis menyebabkan masyarakat di perbatasan memiliki keterkaitan budaya, dan bahkan terhubung secara kekerabatan dengan masyarakat lainnya, menyebabkan apa yang terjadi pada masyarakat disatu negara dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat di negara lainnya. Untuk mengelola masyarakat diperbatasan perlu adanya kerja sama, karena menyangkut warga negara lain juga. Daya tarik yang dimiliki Indonesia bagi Filipina dalam bidang pertahanan adalah, Indonesia adalah negara ASEAN yang sangat berpengalaman dalam masalah *counter terrorism*. Indonesia juga adalah salah satu negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. Filipina adalah mitra dagang Indonesia, kegiatan perdagangan dengan Filipina memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Filipina juga adalah salah satu pembeli dari produk BUMNIS Indonesia, seperti PT. Pindad dan PT. Pal.

Maka kerja sama internasional antara Indonesia dan Filipina sangat penting bagi kedua negara.

Kerja sama internasional yang dijalin oleh Indonesia dan Filipina tidak akan melanggar prinsip dan nilai yang dimiliki kedua negara dan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai dari ASEAN. Kerja sama yang dijalin oleh kedua negara dalam mengatasi masalah terorisme Filipina Selatan, antara lain adalah kerja sama patroli terkordinasi, latihan bersama, dan kerja sama pertukaran informasi.

Kerja sama pertukaran informasi adalah kerja sama yang penting dalam menghadapi ancaman terorisme Filipina Selatan. Kerja sama ini dapat membantu kedua negara dalam memonitor pergerakan dari kelompok teroris dan melakukan tindakan antisipasi. Kerja sama ini juga memungkinkan terjadinya *transfer of knowledge* dari negara yang lebih berpengalaman dengan tujuan peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kerja sama pertukaran informasi diharapkan dapat menjadi jalan dalam terciptanya kerja sama pemberantasan terorisme antara Filipina dan Indonesia melalui pendekatan yang *soft*. Kerja sama Filipina dan Indonesia dalam masalah *counter terrorism* lebih menggunakan

pendekatan yang keras atau *hard approach*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa narasumber sepakat bahwa dalam melawan terorisme peran dari pendekatan yang lebih halus sangat penting. Pendapat Cronin tentang enam cara berakhirnya terorisme, disebutkan bahwa salah satunya adalah hilangnya dukungan dari masyarakat.

Masyarakat Filipina selatan, dapat dikatakan sebagai masyarakat yang menerima hadirnya kelompok terorisme diantara mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang berjalannya kegiatan ekonomi disana, sehingga mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, akibatnya banyak masyarakat bergabung dengan kelompok militan untuk bekerja. Masyarakat disana juga lebih mudah terpengaruh ajaran radikal, karena tidak adanya organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah di Indonesia yang dapat membantu pemerintah Filipina dalam meluruskan ajaran yang salah.

Indonesia telah banyak memiliki pengalaman dalam menghadapi terorisme, dan telah menyadari pentingnya faktor masyarakat dalam

menghadapi terorisme. Indonesia telah menawarkan metode-metode *soft approach* mereka kepada Filipina, seperti penerapan Binter dan Bela Negara. Filipina diklaim memberikan respon yang positif dalam masalah ini, namun belum ada pelaksanaan secara nyata belum terjadi.

Kerja sama Pertukaran Informasi Bagian Diplomasi Pertahanan

Merujuk pada kegiatan diplomasi pertahanan dari Cottey dan Foster²⁰. Disebutkan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan bilateral adalah kegiatan diplomasi pertahanan. Begitu pula dengan Hubungan bilateral dan multilateral antara perwira senior dan pejabat kementerian pertahanan. Artinya kerja sama pertukaran informasi adalah perwujudan dari diplomasi pertahanan.

Kerja sama pertukaran informasi adalah hasil dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pertahanan, maka kerja sama pertukaran informasi adalah salah satu perwujudan dari diplomasi pertahanan. Selain itu kerja sama ini melibatkan kementerian pertahanan kedua negara dan juga untuk mewujudkan pertahanan di kedua negara.

²⁰ A. Cottey, A. Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and*

Assistance, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm.7.

Peran diplomasi pertahanan dalam kerja sama pertukaran informasi sendiri terbagi kedalam tiga peran pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan. Hal ini merujuk pada tujuan diplomasi pertahanan menurut Supriyatno, salah satu tujuan dari diplomasi pertahanan adalah membangun rasa saling percaya²¹. Masalah ini sangat penting dalam kegiatan kerja sama pertukaran informasi, lebih lanjut diplomasi pertahaan yang bertujuan dalam membangun rasa saling percaya memiliki beberapa peran dalam kerja sama pertukaran informasi.

1. Pembentukan Kerja Sama

Kerja sama pertukaran informasi adalah kerja sama yang dapat terlaksana dengan adanya tingkat kepercayaan yang kuat diantara negara-negara yang terlibat. Hal ini dikarenakan dalam pertukaran informasi terdapat informasi sensitif bagi suatu negara.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kolonel Yudi Yulistianto, menurutnya dalam kerja sama pertahanan kepercayaan sangat penting. Menurutnya juga perjanjian kerja sama dengan tingat yang paling tinggi dalam sistem hukum Indonesia adalah perjanjian tentang kerja sama

pertahanan²². Artinya Indonesia hanya akan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara yang telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Indonesia telah membangun kerja sama pertahanan dengan Filipina sejak lama, sehingga terjalinnya hubungan baik dalam bidang pertahanan baik *army to army*, *navy to navy*, dan *airforce to airforce*. Hubungan ini tidak tercipta begitu saja. Rasa percaya antara kedua negara dibangun secara bertahap. Contohnya adalah program Corpatech, program ini memungkinkan kedua angkatan laut bertemu dan berinteraksi dalam program latihan bersama. Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat membangun rasa percaya dari Filipina terhadap Indonesia.

Program kerja sama Indomalphi yang dibentuk pada 2017, sendiri dapat tercipta berkat adanya kekuatan diplomasi Indonesia. Kerja sama tersebut adalah ide dari Indonesia. Selain itu, Malaysia dan Filipina memiliki masalah dalam komunikasi akibat adanya masalah Sabah. Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Malaysia, dibuktikan dengan adanya

²¹ Makmur Supriyatno, Tentang Ilmu Pertahanan, (Jakarta : Pustaka Obor,2014), hlm.178-179.

²² Kolonel Yudi Yulistianto, Wawancara pada 5 Februari 2018.

program *Malacca Strait Patrol* (MSP). Dengan adanya kepercayaan dari kedua negara terhadap Indonesia maka kerja sama ini dapat terbentuk.

Disebutkan sebelumnya bahwa alasan Malaysia dilibatkan dalam kerja sama ini adalah untuk meluruskan persepsi keterlibatan Malaysia dengan aksi teror yang terjadi di Indonesia dan Filipina, selain juga Malaysia juga memiliki kepentingan dalam mengamankan wilayah di perairan Sulu.

Hal ini adalah penerapan dari diplomasi pertahanan, untuk meningkatkan rasa saling percaya, sehingga dapat menghindari potensi konflik yang dapat terjadi.

Maka suatu kerja sama pertahanan dapat terbentuk, akibat adanya rasa saling percaya yang dibangun oleh diplomasi pertahanan suatu negara. Tujuan dari kerja sama pertahanan juga adalah untuk menjaga dan meningkatkan rasa saling percaya.

2. Pelaksanaan Kerja Sama

Sebelumnya telah disinggung bahwa dalam kerja sama pertukaran informasi adanya kesetaraan dalam sistem sangat penting. Dalam kerja sama pertukaran informasi yang dilakukan oleh

Indonesia dan Filipina, hal ini masih menjadi kendala. Karenanya dalam kerja sama pertukaran informasi *our eyes* memanfaatkan sistem DCL milik ASEAN.

Membangun rasa saling percaya juga penting dalam tahap pelaksanaan ini. Rasa percaya yang dibangun adalah rasa percaya antara enam negara yang terlibat dalam kerja sama ini dengan empat negara ASEAN lainnya yang belum terlibat dalam kerja sama ini. Enam negara ini harus dapat menjelaskan tujuan dari kerja sama ini dan alasan digunakannya fasilitas ini. Mereka juga harus dapat meyakinkan pada ASEAN bahwa kerja sama yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai yang dimiliki ASEAN.

Keberadaan LO yang penting dalam pertukaran informasi juga telah disinggung sebelumnya. LO dapat dilatih dengan adanya diplomasi pertahanan. Cottey dan Foster mengatakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan adalah penempatan personel di lembaga pertahanan negara mitra dan juga penunjukan atase pertahanan di negara mitra²³. Personel terkait dalam masalah

²³ A. Cottey, A. Forster, *loc.cit.*

ini dapat membantu kedua negara dalam membangun rasa saling percaya dan juga interoperabilitas kedua negara. Mereka dapat mempelajari norma-norma budaya dan juga tingkah laku negara dimana mereka ditempatkan. Hal ini sangat penting dalam kerja sama pertukaran informasi seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

3. Pengembangan Kerja Sama

Kerja sama *our eyes* diproyeksikan nantinya akan melibatkan seluruh negara ASEAN dan juga tidak hanya tentang masalah terorisme saja. Diplomasi yang dilakukan keenam negara yang telah terlibat dapat menentukan terwujudnya hal ini. Mereka harus dapat meyakinkan negara yang belum bergabung untuk dapat bergabung. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog-dialog yang dilakukan negara ASEAN, seperti forum ADMM dan ARF.

Forum-forum ini juga dapat digunakan dalam membangun rasa percaya dengan negara mitra ASEAN. Dalam ADMM Plus, misalnya enam negara dapat menjelaskan tujuan dibentuknya *our eyes initiative* kepada negara mitra. Juga menjelaskan mengapa dalam kerja sama ini lebih

mengutamakan negara dari ASEAN dibandingkan luar ASEAN. Hal ini perlu dilakukan dalam meningkatkan dan menjaga rasa saling percaya diantara ASEAN dan negara mitra ASEAN

Implementasi Kerja Sama Pertukaran

Informasi Indonesia-Filipina

Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disahkan, selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari kebijakan di lapangan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dibuat tanpa adanya implementasi yang baik, tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Maka implementasi memiliki peran penting dalam suatu kebijakan.

Dalam menghadapi masalah terorisme Filipina Selatan, Indonesia dan telah Filipina telah membuat kebijakan untuk bekerja sama dalam masalah pertukaran informasi. Kerja sama ini mengalami pengembangan tidak hanya secara bilateral, tetapi juga trilateral dengan melibatkan Malaysia, bahkan pada kerja sama *our eyes* menjadi lebih besar lagi dengan ditambahkan tiga negara lagi.

Implementasi dari kerja sama pertukaran informasi *our eyes*, secara garis besar memiliki mekanisme yang sama dengan proses komunikasi. Berdasarkan penelitian wawancara, mekanisme *our eyes* adalah saat ada satu negara yang

mendapatkan informasi tentang masalah terorisme, negara tersebut akan mengirimkan informasi ke server yang berada di Brunei Darussalam, lalu disebarkan ke negara-negara anggota²⁴. Informasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam operasi menghadapi terorisme. Namun, mengingat kerja sama ini baru berumur beberapa bulan dan juga belum berjalan secara maksimal pelaksanaannya maka sulit untuk menilai implementasinya.

Indonesia dan Filipina memiliki kerja sama pertukaran informasi lainnya, baik itu secara eksklusif antara lembaga ke lembaga, maupun yang mencakup secara umum. Kerja sama informasi yang secara umum dilaksanakan kedua negara adalah kerja sama *mutual counselor notification*. Dalam kerja sama ini kedua negara diharuskan memberikan informasi ke negara mitra kerja samanya saat menangkap warga negara mitranya.

Menurut pernyataan dari Hastin Dumadi kerja sama ini belum terlaksana secara baik, dimana Filipina seringkali memberikan pernyataan kepada media terlebih dahulu ketika menangkap seorang WNI sebelum

mengkonfirmasi dengan Indonesia terlebih dahulu²⁵. Hastin juga menambahkan bahwa kerja sama pertukaran informasi antar lembaga juga belum terimplementasi dengan baik, dengan alasan mudahnya FTF untuk keluar dan masuk Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi dari suatu kebijakan menurut George C. Edward²⁶, adalah komunikasi dalam hal mentranmisikan masalah ke kelompok sasaran dan sumberdaya, tanpa adanya sumberdaya yang memadai implementasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam implementasi kerja sama pertukaran informasi ada beberapa yang kendala yang dapat ditemukan. Pertama adalah kurangnya sinergi dari lembaga-lembaga nasional yang memiliki wewenang dalam masalah terorisme. Masalah ini dapat menyebabkan kurang akuratnya informasi yang dimiliki terkait dengan perbedaan informasi dari lembaga yang satu dengan lainnya. Selain itu ada kecenderungan lembaga berbeda memiliki kerja sama yang serupa dengan lembaga yang sama dengan Filipina. Contohnya adalah Polri memiliki kerja

²⁴ Kolonel Yudi Yulistianto, Wawancara pada 5 Februari 2018.

²⁵ Hastin Dumadi, Wawancara pada 18 Desember 2017.

²⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 90-92.

sama patroli terkordinat dan kerja sama pertukaran informasi dengan Kepolisian Filipina, disaat yang sama TNI juga memiliki kerja sama yang serupa dengan angkatan bersenjata Filipina. Masalah ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik dapat menyebabkan kendala. Misalnya Polri mendapatkan suatu informasi tentang terorisme, dan TNI mendapatkan informasi yang berbeda.

Dalam pertukaran informasi ke akuratan informasi sangat penting. Informasi yang dapat menimbulkan kebingungan dan penyesatan dalam masalah pertahanan dapat berbahaya, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam target operasi.

Sinergitas antara kekuatan nasional Indonesia sangat penting dalam implementasi dari pertukaran informasi. Mekanisme dari kerja sama *our eyes* sebagai contohnya. Dalam kerja sama ini salah satu mekanismenya adalah pengawasan dalam lalu lintas manusia. Apabila ada individu yang dicurigai terlibat terorisme keluar dari suatu negara anggota misalnya dari Indonesia, dengan tujuan ke negara anggota lainnya, misalnya Filipina, Indonesia akan memberikan peringatan atau informasi pada Filipina untuk diantisipasi.

Adanya sinergi yang baik sangat vital dalam kerja sama ini. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi lalu lintas manusia dalam suatu negara adalah lembaga imigrasi. Tanpa adanya sinergi antar lembaga akan memakan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Keterlambatan dapat berakibat fatal dalam kerja sama pertukaran informasi. Keterlambatan dalam memberikan informasi dapat berakibat dalam keterlambatan dalam antisipasi. Kembali ke teori dari Tata Sutabri, hal ini dapat mengurangi kualitas informasi, akibat kurangnya unsur ketepatan waktu.

Kendala ini dapat diatasi apabila Indonesia dapat menyinergikan lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang terorisme. Malaysia sebagai perbandingan memiliki suatu lembaga yang bertugas mengelola organisasi yang berwenang dalam masalah terorisme seperti angkatan bersenjata, polisi, dan imigrasi. Lembaga tersebut bernama Dewan Keamanan Nasional. Lembaga ini menyebabkan terjadinya sinergi diantara lembaga-lembaga tersebut, sehingga memudahkan Malaysia dalam menghadapi terorisme. Indonesia perlu membangun suatu sistem yang dapat mendorong terciptanya badan tersebut.

BNPT tidaklah memiliki fungsi yang sama dengan lembaga Dewan Keamanan Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, tugas dari BNPT adalah membantu presiden dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan upaya-upaya nasional bidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait. Jadi tidak memiliki wewenang dalam menjalankan operasi dalam menangkap terorisme. Maka Indonesia belum memiliki lembaga seperti Dewan Keamanan Nasional Malaysia.

Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pertukaran informasi adalah interoperabilitas dari teknologi yang dimiliki dalam pertukaran informasi. Informasi yang dibagikan dalam pertukaran informasi meliputi informasi yang sederhana sampai dengan informasi yang sensitif bagi negara. Informasi yang sensitif seperti, informasi tentang laporan intelijen dan informasi tentang data penempatan militer dan logistik.

Dalam keamanan dari informasi yang sensitif dibutuhkan teknologi yang tidak mudah. Indonesia dan Filipina masih memiliki keterbatasan dalam hal teknologi. Dalam implementasi suatu kebijakan sumber daya adalah faktor penting. Tanpa adanya sumber daya yang

memadai suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan. Dalam kerja sama *our eyes*, adanya keterbatasan Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam bidang teknologi dan juga pendanaan. Dalam mengatasi masalah ini mereka menggunakan fasilitas *direct communication link* milik ASEAN, yang berada di Brunei. Fasilitas ini telah di *crypto*, sehingga memberikan keamanan pada pertukaran informasi.

Faktor yang juga penting dalam implementasi pertukaran informasi adalah keberadaan dari *liaison officer* (LO). LO ini bertugas dalam menkomunikasikan informasi yang didapat, sehingga informasi yang didapat dapat diterima dengan baik. Dalam pertukaran informasi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi informasi seperti perspektif nasional dari suatu negara, dan perbedaan bahasa dan budaya.

Seorang LO dapat dilatih dengan adanya pertukaran personel. Dengan adanya pertukaran personel, seorang individu dapat mempelajari norma-norma budaya dan perilaku dari negara dimana dia ditempatkan. Dengan tujuan meningkatkan interoperabilitas antara kedua negara, akibat adanya peningkatan rasa saling percaya dan juga pengertian.

Dalam kerja sama pertukaran informasi Indonesia-Filipina, tidak disebutkan adanya keberadaan LO. Faktor ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab kurang berjalannya implementasi pertukaran informasi Indonesia-Filipina. Selain tentunya faktor kurang tersinerginya instansi pemerintah dalam negeri terkait masalah terorisme.

Kerja sama pertukaran informasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Filipina masih terfokus pada masalah intelijen dan penegakan hukum, artinya masih terfokus pada pendekatan yang keras, belum menyentuh pendekatan yang lunak. Dalam kegiatan wawancara, Yoedhi Swastanto mengatakan bahwa dalam melawan terorisme yang lebih penting adalah pendekatan lunak dibandingkan pendekatan keras. Pendekatan lunak berperan dalam menanamkan ideologi pada masyarakat yang dapat melawan ideologi radikal yang diberikan oleh kelompok teroris²⁷.

Menurut Cronin, salah satu dari enam cara dalam mengakhiri terorisme adalah kehilangan dukungan dari masyarakat atau *lossing public support*²⁸. Untuk dapat mencapai tujuan ini diperlukan pendekatan yang lunak yang

dapat mempengaruhi pemikiran dari masyarakat agar menjauhi terorisme. Sehingga perlu adanya pengembangan kerja sama pertukaran informasi yang menitik beratkan pada masalah penanggulangan terorisme dengan pendekatan yang lunak.

Kesimpulan

Dengan berdasar pada penelitian tentang kerja sama pertukaran informasi Indonesia dan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme Filipina Selatan. Terdapat beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan penelitian :

1. Terorisme Filipina Selatan memberikan dampak bagi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak terjadi terutama pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan yang terganggu adalah kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi.
2. Implementasi kerja sama pertukaran informasi belum terimplementasi dengan baik. Ada beberapa kendala yang menyebabkan hal ini. Pertama adalah kendala komunikasi, masalah ini terjadi baik secara eksternal dan internal. Kedua adalah adanya masalah

²⁷ Mayjen Yoedhi Swastanto, Wawancara 2 Februari 2018.

²⁸ Marthen Luther Djari, op.cit, hlm. 36-37.

dana dan teknologi. Lebih lanjut perlu adanya pengembangan kerja sama pertukaran informasi yang terfokus pada pendekatan penanggulangan terorisme secara lunak.

Daftar Pustaka

Buku

- Cottey, A., & Foster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Oxford University Press.
- Djari, M. L. (2013). *Terorisme dan TNI*. Jakarta: CMB Press.
- Nuechterlein, D.E. (1978). *National Interests and Presidential Leadership : The Setting of Priorities*. Boulder, CO: Westview Press.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications Inc.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Pustaka Obor.

Dokumen

- Atase Dagang Manila. (2017). *Laporan Atdag Manila, Filipina, Januari 2017*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- KBRI Manila. (2014). *Renstra KBRI Manila 2015-2019*. KBRI Manila.

Wawancara

- Dumadi, H. (2017, December 18). Deputi Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Swastanto, M. T. (2018, February 2). Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia
- Yulistyanto, K. Y. (2018, February 5). Kepala Subdirektorat Bilateral Kementerian Pertahanan Indonesia.

Laman Web

- Dispenarmatim. (2016, May 26). PANGARMATIM BUKA CORPAT PHILINDO XXX-16. Retrieved August 2017, from TNI AL: <http://www.tnial.mil.id/News/OperasiLatihan/tabid/80/articleType/ArticleView/articleId/29361/PANGARMATIM-BUKA-CORPAT-PHILINDO-XXX16.aspx>
- Muhaimin. (2017, june). *Korban Tewas di Marawi Tembus 300 Jiwa, Duterte: Operasi akan Berakhir*. Retrieved august 2017, from Sindonews: <https://international.sindonews.com/read/1214581/40/korban-tewas-di-marawi-tembus-300-jiwa-duterte-operasi-akan-berakhir-1497745014>
- Putra, L. M. (2016, December 20). *Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun Ini*. Retrieved November 7, 2017, from Kompas: <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanjang.tahun.ini>
- Romadoni, A. (2017, July). *Wiranto: Indonesia Rancang Operasi Berantas ISIS di Marawi*. Retrieved August 2017, from Liputan6.com: <http://news.liputan6.com/read/3009710/wiranto-indonesia-rancang-operasi-berantas-isis-di-marawi>

Suhendra, N. (2017, June). *Teror ISIS di Dunia*. Retrieved August 2017, from Kata Data:
<http://katadata.co.id/infografik/2017/06/02/teror-isis-di-dunia>

Wadrianto, G. K. (2017, May). *Apa yang Terjadi di Marawi, dan Siapa Isnilon Hapilon?* Retrieved august 2017, from Kompas:
<http://internasional.kompas.com/read/2017/05/24/13041501/apa.yang.terjadi.di.marawi.dan.siapa.isnilon.hapilon>.

